



**PENETAPAN**

Nomor 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

- 1. NADA DIMAS ADI DWI GUNA bin ALMIZAN**, Tempat lahir di Sungai Empat, tanggal 04 November 2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Usaha Ternak Ayam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan pangkalan IX RT.008 RW. 007 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;
- 2. RUHMANIA binti SINO**, Tempat dan Tanggal Lahir di Belantaraya, tanggal 01 Desember 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan pangkalan IX RT.008 RW. 007 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AFRIZAL, S.H.MH dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020. Selanjutnya semua pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 12 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 di Gang Merbau RT.03 RW.17 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Bapak **SINO bin DOLONG ALIM** dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama imam **H. HAMDANI S.** dengan saksi pernikahan yaitu Bapak **MISTAR** dan Bapak **SAMIRAN** dan maharnya uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Jalan pangkalan IX RT.008 RW. 007 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **SHOFIA DURATU ANNASIHA ZAHIDAH binti NADA DIMAS ADI DWI GUNA**, lahir di Sungai Empat, 15 Oktober 2019.
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu Para Pemohon belum mencapai usia pernikahan sehingga para Pemohon menikah dengan imam dan bukan dengan petugas KUA sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah mendapatkan surat kutipan akta nikah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengajukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, dan Pegawai KUA Kecamatan Gaung Anak Serka menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya.
9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **NADA DIMAS ADI DWI GUNA bin ALMIZAN dan RUHMANIA binti SINO** menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 di Gang Merbau RT.03 RW.17 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau .
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 13 November 2020 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NADA DIMAS ADI DWI GUNA** NIK 1404060411000001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUHMANIA** NIK 1404124112000001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

## B. Saksi:

1. **ALMIZAN bin LADAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl Pangkalan, RT.08 RW.07, Kelurahan Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **NADA DIMAS ADI DWI GUNA** dan Pemohon II bernama **RUHMANIA**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 27 Desember 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **SINO BIN DO LONG ALIM**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Imam yang bernama **H. HAMDANI S** dengan saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama **MISTAR** dan **SAMIRAN**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Jalan pangkalan IX RT.008 RW. 007 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **SHOFIA DURATU ANNASIHA ZAHIDAH binti NADA DIMAS ADI DWI GUNA**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **HERMAN bin DARMAWAN**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Simpang Kenanga, RT.02 RW.02, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **NADA DIMAS ADI DWI GUNA** dan Pemohon II bernama **RUHMANIA**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 27 Desember 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **SINO BIN DOLONG ALIM**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Imam yang bernama **H. HAMDANI S** dengan saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama **MISTAR** dan **SAMIRAN**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Jalan pangkalan IX RT.008 RW. 007 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **SHOFIA DURATU ANNASIHA ZAHIDAH binti NADA DIMAS ADI DWI GUNA**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2018 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi Pemerintahan salah satunya adalah untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, yang masing-masing alat bukti tersebut telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk P.II) merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal bersama di Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Jalan pangkalan IX RT.008 RW. 007 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **SHOFIA DURATU ANNASIHA ZAHIDAH binti NADA DIMAS ADI DWI GUNA**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama **ALMIZAN bin LADAN** dan **HERMAN bin DARMAWAN**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara metariil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi hadir langsung pada saat prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 27 Desember 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **SINO BIN DOLONG ALIM**;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Imam yang bernama **H. HAMDANI S** dengan saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama **MISTAR** dan **SAMIRAN**;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Jalan pangkalan IX RT.008 RW. 007 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Provinsi Riau dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **SHOFIA DURATU ANNASIHA ZAHIDAH binti NADA DIMAS ADI DWI GUNA**;

6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 4, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai satu orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan,

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, di Parit Beringin Jaya RT. 013 RW.005, Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan **NADA DIMAS ADI DWI GUNA bin ALMIZAN** dan **RUHMANIA binti SINO** menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 di Gang Merbau RT.03 RW.17 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau .

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 07 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1442 H, oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ABDUL AZIS. S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II di damping Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**ZULFIKAR, S.H.I.,**

Hakim Anggota I,

**AMRY SAPUTRA, S.H**

Hakim Anggota II,

**AHMAD KHATIB, S.H.I**

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No. 0271/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS. S.H**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	00.000,00
3. PNBP	RP	10.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah);